



SALINAN

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN NILAI DAN KELAS JABATAN DI SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan jabatan sesuai perubahan struktur sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan berdasarkan

hasil analisa jabatan dan evaluasi jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, perlu ditetapkan nilai dan kelas jabatan;

- b. bahwa hasil dari evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan tertulis Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/1167/M.SM.02.00/2023 tanggal 27 Oktober 2023 tentang Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 30);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN NILAI DAN KELAS JABATAN DI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Penetapan nilai dan kelas jabatan digunakan untuk penataan kelembagaan dan kepegawaian di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 2

Penetapan nilai dan kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.

Pasal 3

(1) Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini mulai berlaku, terhadap pejabat pelaksana yang dilakukan penyesuaian jabatan tetapi belum memenuhi syarat jabatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini tetap dapat melakukan tugasnya.

- (2) Pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kualifikasi pendidikan dalam jabatannya paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak menduduki jabatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.
- (3) Kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dengan:
 - a. pendidikan formal;
 - b. uji kompetensi; atau
 - c. sertifikat keahlian.
- (4) Verifikasi kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh unit kerja yang membidangi sumber daya manusia aparatur.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 23 November 2023

SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

INDRA ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

Ttd.

Endang Suryastuti, S.H., M.Si.

PARAF KOORDINASI	A
KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI	OK
KEPALA BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT	OK

LAMPIRAN
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG
NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN NILAI DAN
KELAS JABATAN DI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NILAI DAN KELAS JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA, JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR, DAN JABATAN PENGAWAS DI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 RUANG LINGKUP + DAMPAK (1-5)		FAKTOR 2 PENGATURAN ORGANISASI (1-3)		FAKTOR 3 WEWENANG PENYELIAAN & MANAJERIAL (1-3)		FAKTOR 4 HUBUNGAN PERSONAL				FAKTOR 5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN (1-8)		FAKTOR 6 KONDISI LAIN (1-6)	
										SIFAT HUB. (1-4)		TUJUAN HUB. (1-4)					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	
1	Sekretaris Jenderal	17 (N-G)	4.730	5	900	3	350	3	900	4	100	4	125	8	1.030	6	1.325
2	Deputi Bidang Persidangan	17	4.105	5	900	3	350	3	900	4	100	4	125	4	505	5	1.225
3	Kepala Biro Persidangan I	15	3.290	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	3	340	3	975
4	Kepala Bagian Sekretariat Komisi I	13	2.455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
5	Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Komisi I	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
6	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Komisi I	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
7	Kepala Bagian Sekretariat Komisi II	13	2.455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
8	Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Komisi II	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310

9	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Komisi II	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
10	Kepala Bagian Sekretariat Komisi III	13	2.455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
11	Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Komisi III	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
12	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Komisi III	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
13	Kepala Bagian Sekretariat Komisi IV	13	2.455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
14	Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Komisi IV	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
15	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Komisi IV	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
16	Kepala Bagian Sekretariat Komisi V	13	2.455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
17	Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Komisi V	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
18	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Komisi V	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
19	Kepala Bagian Sekretariat Komisi VI	13	2.455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
20	Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Komisi VI	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
21	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Komisi VI	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
22	Kepala Bagian Sekretariat Komisi VII	13	2.455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575

23	Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Komisi VII	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
24	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Komisi VII	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
25	Kepala Bagian Sekretariat Komisi VIII	13	2.455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
26	Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Komisi VIII	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
27	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Komisi VIII	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
28	Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX	13	2.455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
29	Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Komisi IX	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
30	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Komisi IX	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
31	Kepala Bagian Sekretariat Komisi X	13	2.455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
32	Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Komisi X	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
33	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Komisi X	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
34	Kepala Bagian Sekretariat Komisi XI	13	2.455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
35	Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Komisi XI	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
36	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Komisi XI	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310

37	Kepala Bagian Persidangan Paripurna	13	2.455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
38	Kepala Subbagian Rapat Persidangan Paripurna	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
39	Kepala Subbagian Tata Usaha Persidangan Paripurna	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
40	Kepala Bagian Risalah	13	2.455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
41	Kepala Subbagian Pelayanan Risalah	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
42	Kepala Subbagian Tata Usaha Risalah	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
43	Kepala Biro Persidangan II	15	3.290	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	3	340	3	975
44	Kepala Bagian Sekretariat Badan Legislasi	13	2.455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
45	Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Badan Legislasi	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
46	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Badan Legislasi	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
47	Kepala Bagian Sekretariat Badan Anggaran	13	2.455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
48	Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Badan Anggaran	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
49	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Badan Anggaran	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
50	Kepala Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara	13	2.455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575

51	Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
52	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
53	Kepala Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan	13	2.455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
54	Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
55	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
56	Kepala Subbagian Administrasi Perkara Mahkamah Kehormatan Dewan	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
57	Kepala Bagian Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga	13	2.455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
58	Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
59	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
60	Kepala Bagian Sekretariat Panitia Khusus	13	2.455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575

61	Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Panitia Khusus	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
62	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Panitia Khusus	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
63	Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan	15	3.290	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	3	340	3	975
64	Kepala Bagian Sekretariat Ketua	13	2.455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
65	Kepala Subbagian Kerumahtanggaan Sekretariat Ketua	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
66	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Ketua	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
67	Kepala Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan	13	2.455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
68	Kepala Subbagian Kerumahtanggaan Sekretariat Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
69	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
70	Kepala Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan	13	2.455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575

71	Kepala Subbagian Kerumahtanggaan Sekretariat Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
72	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
73	Kepala Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan	13	2.455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
74	Kepala Subbagian Kerumahtanggaan Sekretariat Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
75	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
76	Kepala Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat	13	2.455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
77	Kepala Subbagian Kerumahtanggaan Sekretariat Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
78	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310

79	Kepala Bagian Sekretariat Badan Musyawarah	13	2.455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
80	Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Badan Musyawarah	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
81	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Badan Musyawarah	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
82	Kepala Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan	13	2.455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
83	Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Musyawarah Pimpinan	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
84	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Musyawarah Pimpinan	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
85	Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal	13	2.455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
86	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
87	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Persidangan	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
88	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Administrasi	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
89	Kepala Subbagian Persuratan	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
90	Kepala Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi	13	2.455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575

91	Kepala Subbagian Administrasi Keanggotaan	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
92	Kepala Subbagian Kesekretariatan Fraksi	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
93	Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional	15	3.600	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	4	1.120
94	Kepala Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Internasional	13	2.455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
95	Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Kerja Sama Organisasi Internasional	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
96	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Kerja Sama Organisasi Internasional	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
97	Kepala Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional	13	2.455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
98	Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
99	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
100	Kepala Bagian Sekretariat Kerja Sama Bilateral	13	2.655	3	550	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
101	Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Kerja Sama Bilateral	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310

102	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Kerja Sama Bilateral	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
103	Kepala Bagian Fasilitasi Kegiatan Luar Negeri Anggota dan Alih Bahasa	13	2.655	3	550	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
104	Kepala Subbagian Fasilitasi Kegiatan Luar Negeri Anggota	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
105	Kepala Subbagian Alih Bahasa	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
106	Kepala Biro Pemberitaan Parlemen	15	3.290	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	3	340	3	975
107	Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial	13	2.455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
108	Kepala Subbagian Media Cetak dan Website	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
109	Kepala Subbagian Media Sosial	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
110	Kepala Subbagian Analisis Media	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
111	Kepala Bagian Televisi dan Radio Parlemen	13	2.490	3	550	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
112	Kepala Subbagian Program dan Produksi Televisi	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
113	Kepala Subbagian Program dan Produksi Radio	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
114	Kepala Subbagian Teknik Televisi dan Radio	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
115	Kepala Bagian Penerbitan	13	2.455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
116	Kepala Subbagian Produksi	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310

117	Kepala Subbagian Distribusi	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
118	Kepala Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat	15	3.290	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	3	340	3	975
119	Kepala Bagian Protokol	13	2.455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
120	Kepala Subbagian Acara Pimpinan DPR RI dan Sekretariat Jenderal	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
121	Kepala Subbagian Acara Alat Kelengkapan Dewan	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
122	Kepala Subbagian Penyelenggaraan Upacara DPR RI dan Sekretariat Jenderal	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
123	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum	13	2.455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
124	Kepala Subbagian Informasi Publik dan Kunjungan Masyarakat	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
125	Kepala Subbagian Promosi, Diseminasi, dan Edukasi Publik	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
126	Kepala Subbagian Pengelolaan Museum	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
127	Kepala Bagian Arsip	13	2.455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
128	Kepala Bagian Perpustakaan	13	2.455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
129	Deputi Bidang Administrasi	17	4.105	5	900	3	350	3	900	4	100	4	125	4	505	5	1.225
130	Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	15	3.290	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	3	340	3	975

131	Kepala Bagian Pembentukan Produk Hukum	13	2.455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
132	Kepala Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum	13	2.455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
133	Kepala Bagian Pengaduan Masyarakat	13	2.455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
134	Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur	15	3.290	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	3	340	3	975
135	Kepala Bagian Perencanaan dan Pola Karier ASN	13	2.455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
136	Kepala Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi ASN	13	2.455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
137	Kepala Bagian Manajemen SDM Non ASN	13	2.490	3	550	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
138	Kepala Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional	13	2.490	3	550	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
139	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi	15	3.455	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	3	975
140	Kepala Bagian Perencanaan	13	2.455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
141	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran DPR	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
142	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310

143	Kepala Subbagian Monitoring dan Evaluasi Program dan Anggaran	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
144	Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi	13	2.455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
145	Kepala Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
146	Kepala Subbagian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
147	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	13	2.455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
148	Kepala Subbagian Organisasi	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
149	Kepala Subbagian Penataan Jabatan	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
150	Kepala Subbagian Tata Laksana	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
151	Kepala Biro Keuangan	15	3.290	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	3	340	3	975
152	Kepala Bagian Administrasi Keuangan	13	2.455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
153	Kepala Bagian Administrasi Barang Milik Negara	13	2.490	3	550	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
154	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310

155	Kepala Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan Barang Milik Negara	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
156	Kepala Subbagian Pembukuan dan Pelaporan Barang Milik Negara	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
157	Kepala Bagian Perjalanan	13	2.455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
158	Kepala Subbagian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dewan	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
159	Kepala Subbagian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sekretariat Jenderal	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
160	Kepala Subbagian Perjalanan Dinas Luar Negeri	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
161	Kepala Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	15	3.290	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	3	340	3	975
162	Kepala Bagian Gedung dan Instalasi	13	2.455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
163	Kepala Subbagian Gedung dan Taman	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
164	Kepala Subbagian Elektrikal	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
165	Kepala Subbagian Mekanikal	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
166	Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan	13	2.455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
167	Kepala Subbagian Pengelolaan RJ Anggota Kalibata	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310

168	Kepala Subbagian Pengelolaan RJ Pimpinan dan RJ Anggota Ulujami	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
169	Kepala Bagian Pengelolaan Wisma DPR	13	2.455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
170	Kepala Subbagian Pelayanan Wisma	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
171	Kepala Subbagian Pemeliharaan Wisma	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
172	Kepala Biro Umum	15	3.290	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	3	340	3	975
173	Kepala Bagian Pengamanan Dalam	13	2.455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
174	Kepala Subbagian Pengamanan Kompleks DPR RI	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
175	Kepala Subbagian Pengamanan Rumah Jabatan Pimpinan, Anggota, dan Wisma DPR	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
176	Kepala Subbagian Administrasi dan Logistik Pengamanan Dalam	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
177	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	13	2.455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
178	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Barang/Jasa	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
179	Kepala Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310

180	Kepala Bagian Perlengkapan dan Kendaraan	13	2.490	3	550	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
181	Kepala Subbagian Perlengkapan	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
182	Kepala Subbagian Kendaraan	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
183	Kepala Bagian Layanan Kesehatan	13	2.455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
184	Kepala Subbagian Pelayanan Medik	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
185	Kepala Subbagian Tata Usaha Layanan Kesehatan	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
186	Kepala Badan Keahlian	17	4.105	5	900	3	350	3	900	4	100	4	125	4	505	5	1.225
187	Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia	15	3.520	3	550	2	250	2	775	3	75	3	100	5	650	4	1.120
188	Kelapa Subbagian Tata Usaha Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
189	Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat	15	3.520	3	550	2	250	2	775	3	75	3	100	5	650	4	1.120

190	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
191	Kepala Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara	15	3.520	3	550	2	250	2	775	3	75	3	100	5	650	4	1.120
192	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
193	Kepala Pusat Analisis Keparlemenan	15	3.520	3	550	2	250	2	775	3	75	3	100	5	650	4	1.120
194	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Analisis Keparlemenan	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
195	Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	15	3.290	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	3	340	3	975
196	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
197	Kepala Bagian Administrasi Badan Keahlian	13	2.455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
198	Kepala Subbagian Tata Usaha Badan Keahlian	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310

199	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Badan Keahlian	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
200	Inspektur Utama	17	4.105	5	900	3	350	3	900	4	100	4	125	4	505	5	1.225
201	Inspektur I	15	3.290	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	3	340	3	975
202	Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat I	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
203	Inspektur II	15	3.290	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	3	340	3	975
204	Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat II	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
205	Kepala Bagian Administrasi Inspektorat Utama	13	2.455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
206	Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat Utama	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
207	Kepala Subbagian Tindak Lanjut dan Pelaporan Inspektorat Utama	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
208	Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif	15	3.455	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	3	975
209	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Sosial Kultural	13	2.630	3	550	1	100	2	775	2	50	2	75	4	505	2	575
210	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	13	2.630	3	550	1	100	2	775	2	50	2	75	4	505	2	575

211	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
212	Kepala Pusat Teknologi Informasi	15	3.290	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	3	340	3	975
213	Kepala Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi	13	2.630	3	550	1	100	2	775	2	50	2	75	4	505	2	575
214	Kepala Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi	13	2.630	3	550	1	100	2	775	2	50	2	75	4	505	2	575
215	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Teknologi Informasi	10	1.630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310

NILAI DAN KELAS JABATAN PELAKSANA DI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

NO.	NAMA JABATAN	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	FAKTOR 1 PENGETAHUAN (1-9)		FAKTOR 2 PENGAWASAN (1-5)		FAKTOR 3 PEDOMAN (1-5)		FAKTOR 4 KOMPLEK SITAS (1-6)		FAKTOR 5 R LINGKUP & PENGARUH (1-6)		FAKTOR 6 HUBUNGAN PRIBADI (1-4)		FAKTOR 7 TUJUAN HUBUNGAN (1-4)		FAKTOR 8 TUNTUTAN FISIK (1-3)		FAKTOR 9 LINGK. KERJA (1-3)	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13	
1	Staf Khusus Pimpinan DPR	15	3.190	7	1.250	5	650	4	450	5	325	5	325	3	60	3	120	1	5	1	5
2	Penelaah Teknis Kebijakan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
3	Penata Kelola Sistem Jaringan Penyiaran	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
4	Penata Acara	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
5	Penata Keprotokolan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
6	Pengendali Konten Internet	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
7	Pengolah Data dan Informasi	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
8	Pengadministrasi Perkantoran	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
9	Jurnalis	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
10	Pengelola Siaran	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
11	Pengola Teknik TV dan Radio	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

12	Pengelola Layanan Pengadaan	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
13	Pengelola Keprotokolan	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
14	Teknisi Sarana dan Prasarana	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

NILAI DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL DI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

NO.	NAMA JABATAN	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	FAKTOR 1 PENGETAHUAN (1-9)		FAKTOR 2 PENGAHASAN (1-5)		FAKTOR 3 PEDOMAN (1-5)		FAKTOR 4 KOMPLEK SITAS (1-6)		FAKTOR 5 ELINGHUP & PENGARUH (1-6)		FAKTOR 6 HUBUNGAN PRIBADI (1-4)		FAKTOR 7 TUJUAN HUBUNGAN (1-4)		FAKTOR 8 TUNTUTAN FISIK (1-3)		FAKTOR 9 LINGK. KERJA (1-3)	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13	
1	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Utama	13	2690	5	750	4	450	5	650	5	325	4	225	3	60	4	220	1	5	1	5
2	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Madya	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
3	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
4	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama	8	1310	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
5	Analisis Hukum Ahli Madya	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
6	Analisis Hukum Ahli Muda	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
7	Analisis Hukum Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5

8	Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	2135	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
9	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	1735	6	950	3	275	2	125	3	150	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
10	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
11	Analisis Legislatif Ahli Utama	14	2770	8	1550	3	275	3	275	4	225	4	225	3	60	3	120	1	5	1	5
12	Analisis Legislatif Ahli Madya	12	2110	7	1250	3	275	2	125	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
13	Analisis Legislatif Ahli Muda	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
14	Analisis Legislatif Ahli Pertama	8	1180	5	750	2	125	1	25	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
15	Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Utama	13	2515	6	950	4	450	4	450	5	325	4	255	2	25	2	50	1	5	1	5
16	Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Madya	11	1960	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5

17	Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Muda	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
18	Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
19	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10	1845	6	950	3	275	3	275	3	150	2	75	3	60	2	50	1	5	1	5
20	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8	1270	5	750	2	125	2	125	2	75	2	75	3	60	2	50	1	5	1	5
21	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Madya	12	2170	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	3	60	2	50	1	5	1	5
22	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda	10	1665	6	950	3	275	2	125	3	150	2	75	3	60	1	20	1	5	1	5
23	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5

24	Analisis SDM Aparatur Ahli Madya	12	2135	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
25	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	10	1735	6	950	3	275	2	125	3	150	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
26	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
27	Apoteker Ahli Madya	11	1945	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
28	Apoteker Ahli Muda	9	1370	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
29	Apoteker Ahli Pertama	8	1295	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	2	20
30	Arsiparis Ahli Utama	13	2485	6	950	4	450	4	450	5	325	4	255	2	25	1	20	1	5	1	5
31	Arsiparis Ahli Madya	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
32	Arsiparis Ahli Muda	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
33	Arsiparis Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
34	Arsiparis Penyelia	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
35	Arsiparis Mahir	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
36	Arsiparis Terampil	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
37	Asisten Apoteker Penyelia	8	1245	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	2	20
38	Asisten Apoteker Mahir	7	1020	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	2	20
39	Asisten Apoteker Terampil	6	755	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	2	20
40	Asisten Perisalah Legislatif Penyelia	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
41	Asisten Perisalah Legislatif Mahir	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5

42	Asisten Perisalah Legislatif Terampil	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
43	Auditor Ahli Utama	14	2.820	6	950	5	650	4	450	5	325	4	255	3	60	3	120	1	5	1	5
44	Auditor Ahli Madya	12	2250	5	750	4	450	4	450	4	225	4	225	3	60	2	50	1	5	1	5
45	Auditor Ahli Muda	10	1655	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
46	Auditor Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
47	Auditor Penyelia	9	1380	4	550	3	275	3	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
48	Auditor Mahir	7	940	4	550	2	125	2	125	2	75	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
49	Auditor Terampil	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
50	Bidan Ahli Madya	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
51	Bidan Ahli Muda	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
52	Bidan Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
53	Bidan Penyelia	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
54	Bidan Mahir	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
55	Bidan Terampil	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
56	Dokter Ahli Utama	14	2805	7	1250	4	450	4	450	4	225	5	325	3	60	1	20	1	5	2	20
57	Dokter Ahli Madya	12	2225	6	950	3	275	4	450	4	225	4	255	2	25	1	20	1	5	2	20
58	Dokter Ahli Muda	10	1670	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
59	Dokter Ahli Pertama	9	1370	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
60	Dokter Gigi Ahli Utama	14	2805	7	1250	4	450	4	450	4	225	5	325	3	60	1	20	1	5	2	20
61	Dokter Gigi Ahli Madya	12	2225	6	950	3	275	4	450	4	225	4	255	2	25	1	20	1	5	2	20
62	Dokter Gigi Ahli Muda	10	1670	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
63	Dokter Gigi Ahli Pertama	9	1370	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20

64	Fisioterapis Ahli Madya	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
65	Fisioterapis Ahli Muda	9	1555	6	950	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
66	Fisioterapis Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
67	Fisioterapis Penyelia	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
68	Fisioterapis Mahir	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
69	Fisioterapis Terampil	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
70	Nutrisisionis Ahli Madya	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
71	Nutrisisionis Ahli Muda	9	1555	6	950	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
72	Nutrisisionis Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
73	Nutrisisionis Penyelia	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
74	Nutrisisionis Mahir	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
75	Nutrisisionis Terampil	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
76	Pamong Budaya Ahli Muda	9	1555	6	950	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
77	Pamong Budaya Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
78	Pamong Budaya Penyelia	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
79	Pamong Budaya Mahir	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5

80	Pamong Budaya Terampil	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
81	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Muda	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
82	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
83	Penerjemah Ahli Madya	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
84	Penerjemah Ahli Muda	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
85	Penerjemah Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
86	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	12	2225	6	950	3	275	4	450	4	225	4	255	2	25	1	20	1	5	2	20
87	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10	1695	6	950	3	275	2	125	3	150	2	75	3	60	2	50	1	5	1	5
88	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8	1270	5	750	2	125	2	125	2	75	2	75	3	60	2	50	1	5	1	5
89	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	10	1735	6	950	3	275	2	125	3	150	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5

90	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	8	1205	5	750	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
91	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Utama	14	2800	6	950	4	450	5	650	5	325	4	255	4	110	2	50	1	5	1	5
92	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	12	2170	6	950	3	275	4	450	4	225	3	150	3	60	2	50	1	5	1	5
93	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	10	1610	5	750	3	275	3	275	3	275	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
94	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
95	Perawat Ahli Madya	11	1960	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	2	20	2	20
96	Perawat Ahli Muda	9	1385	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	2	20	2	20
97	Perawat Ahli Pertama	8	1310	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
98	Perawat Penyelia	8	1260	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20

99	Perawat Mahir	7	1035	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
100	Perawat Terampil	6	770	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	2	20	2	20
101	Perekam Medis Ahli Madya	11	1960	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
102	Perekam Medis Ahli Muda	9	1370	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
103	Perekam Medis Ahli Pertama	8	1295	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	2	20
104	Perekam Medis Penyelia	8	1260	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
105	Perekam Medis Mahir	7	1035	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
106	Perekam Medis Terampil	6	770	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	2	20	2	20
107	Perisalah Legislatif Ahli Madya	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
108	Perisalah Legislatif Ahli Muda	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
109	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	8	1310	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
110	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
111	Pranata Hubungan Masyarakat Mahir	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
112	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5

113	Pranata Humas Ahli Madya	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
114	Pranata Humas Ahli Muda	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
115	Pranata Humas Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
116	Pranata Keuangan APBN Penyelia	9	1445	4	550	3	275	2	125	4	225	3	150	3	60	2	50	1	5	1	5
117	Pranata Keuangan APBN Mahir	8	1295	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	3	60	2	50	1	5	1	5
118	Pranata Keuangan APBN Terampil	7	1035	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
119	Pranata Komputer Ahli Utama	13	2515	6	950	4	450	4	450	5	325	4	255	2	25	2	50	1	5	1	5
120	Pranata Komputer Ahli Madya	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
121	Pranata Komputer Ahli Muda	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
122	Pranata Komputer Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
123	Pranata Komputer Penyelia	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
124	Pranata Komputer Mahir	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
125	Pranata Komputer Terampil	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5

126	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
127	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
128	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
129	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
130	Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
131	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
132	Pranata SDM Aparatur Penyelia	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
133	Pranata SDM Aparatur Mahir	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
134	Pranata SDM Aparatur Terampil	6	840	4	550	2	125	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5

135	Pustakawan Ahli Madya	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
136	Pustakawan Ahli Muda	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
137	Pustakawan Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
138	Pustakawan Penyelia	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
139	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
140	Pustakawan Pelaksana	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
141	Radiografer Penyelia	8	1260	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
142	Radiografer Mahir	7	1035	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
143	Radiografer Terampil	6	770	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	2	20	2	20
144	Sanitarian Ahli Muda	9	1370	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
145	Sanitarian Ahli Pertama	8	1295	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	2	20
146	Sanitarian Penyelia	8	1245	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	2	20
147	Sanitarian Mahir	7	1020	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	2	20
148	Sanitarian Terampil	6	755	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	2	20
149	Terapis Gigi dan Mulut Ahli Madya	11	1960	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
150	Terapis Gigi dan Mulut Ahli Muda	9	1370	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
151	Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama	8	1295	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	2	20

152	Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8	1260	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
153	Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7	1035	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
154	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	6	770	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	2	20	2	20
155	Widyaiswara Ahli Utama	14	2950	7	1250	5	650	4	450	4	225	4	225	3	60	2	50	1	5	1	5
156	Widyaiswara Ahli Madya	12	2170	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	3	60	2	50	1	5	1	5
157	Widyaiswara Ahli Muda	10	1665	6	950	3	275	2	125	3	150	2	75	3	60	1	20	1	5	1	5
158	Widyaiswara Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5

**REKAP JUMLAH PERKELAS JABATAN DI SEKRETARIAT
JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NO.	Kelas	Jumlah Jabatan Struktural	Jumlah Jabatan Pelaksana	Jumlah Jabatan Fungsional	TOTAL
1	17 (NG)	1	-	-	1
2	17	4	-	-	4
3	16	-	-	-	0
4	15	21	1	-	22
5	14	-	-	-	0
6	13	65	-	18	83
7	12	-	-	19	19
8	11	-	-	48	48
9	10	124	-	25	149
10	9	-	-	11	11
11	8	-	-	17	17
12	7	-	5	10	15
13	6	-	8	4	12
14	5	-	-	6	6
15	4	-	-	-	0
16	3	-	-	-	0
17	2	-	-	-	0
18	1	-	-	-	0
JUMLAH		215	14	158	387

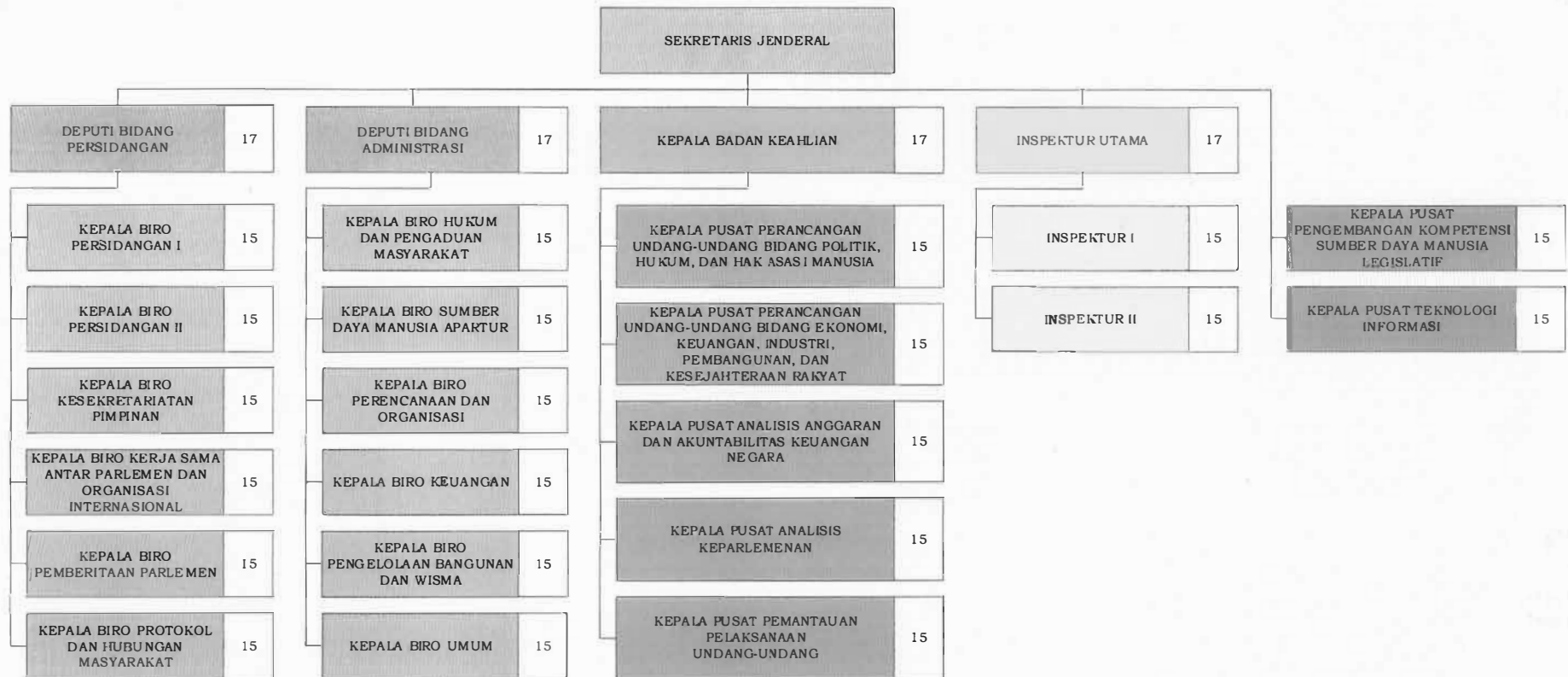
Keterangan Tabel

Jumlah Jabatan Struktural dihitung berdasarkan jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan struktur organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

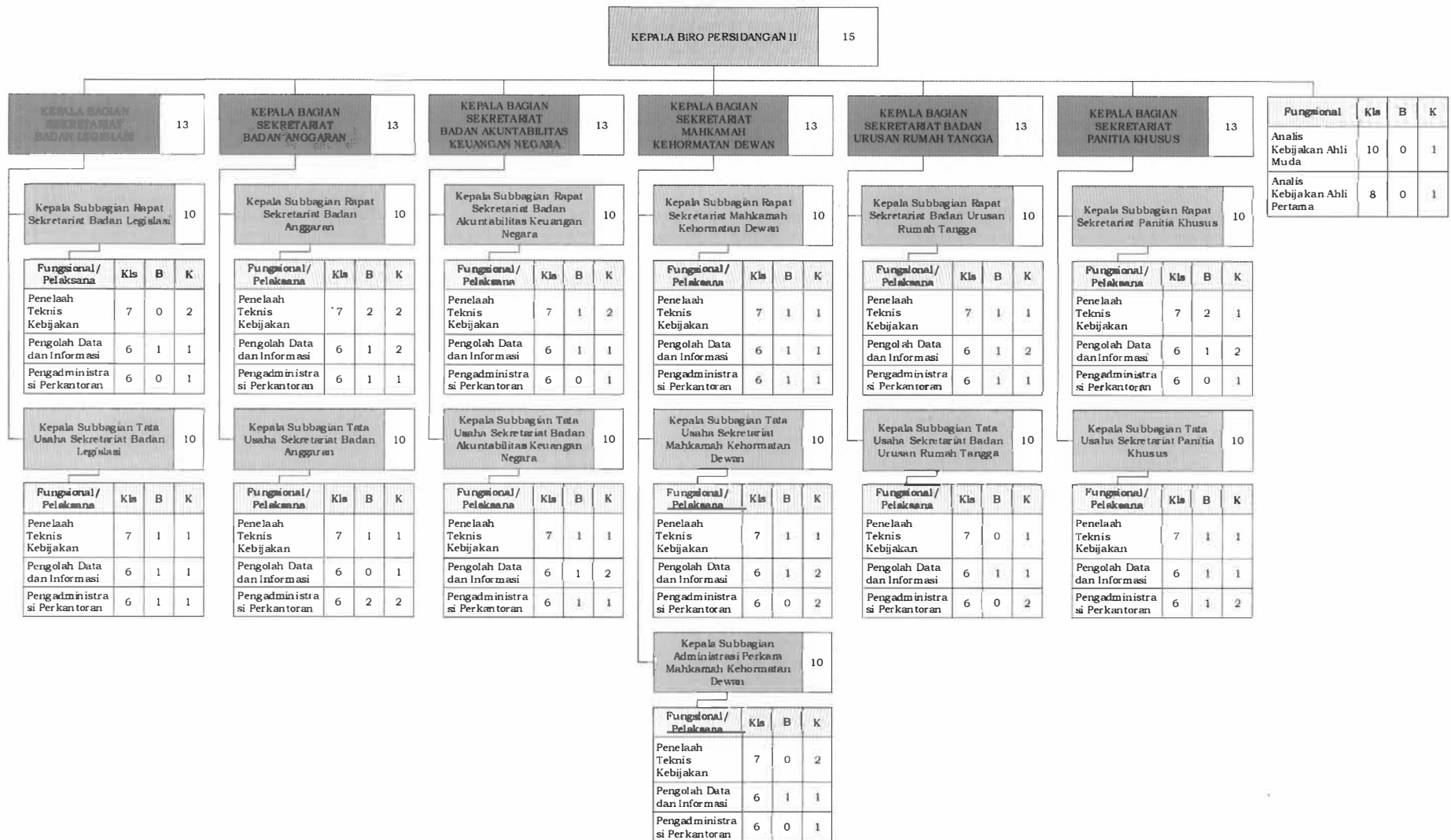
Jumlah Jabatan Pelaksana dihitung berdasarkan jumlah jabatan pelaksana berdasarkan nomenklatur jabatan pelaksana yang ada di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

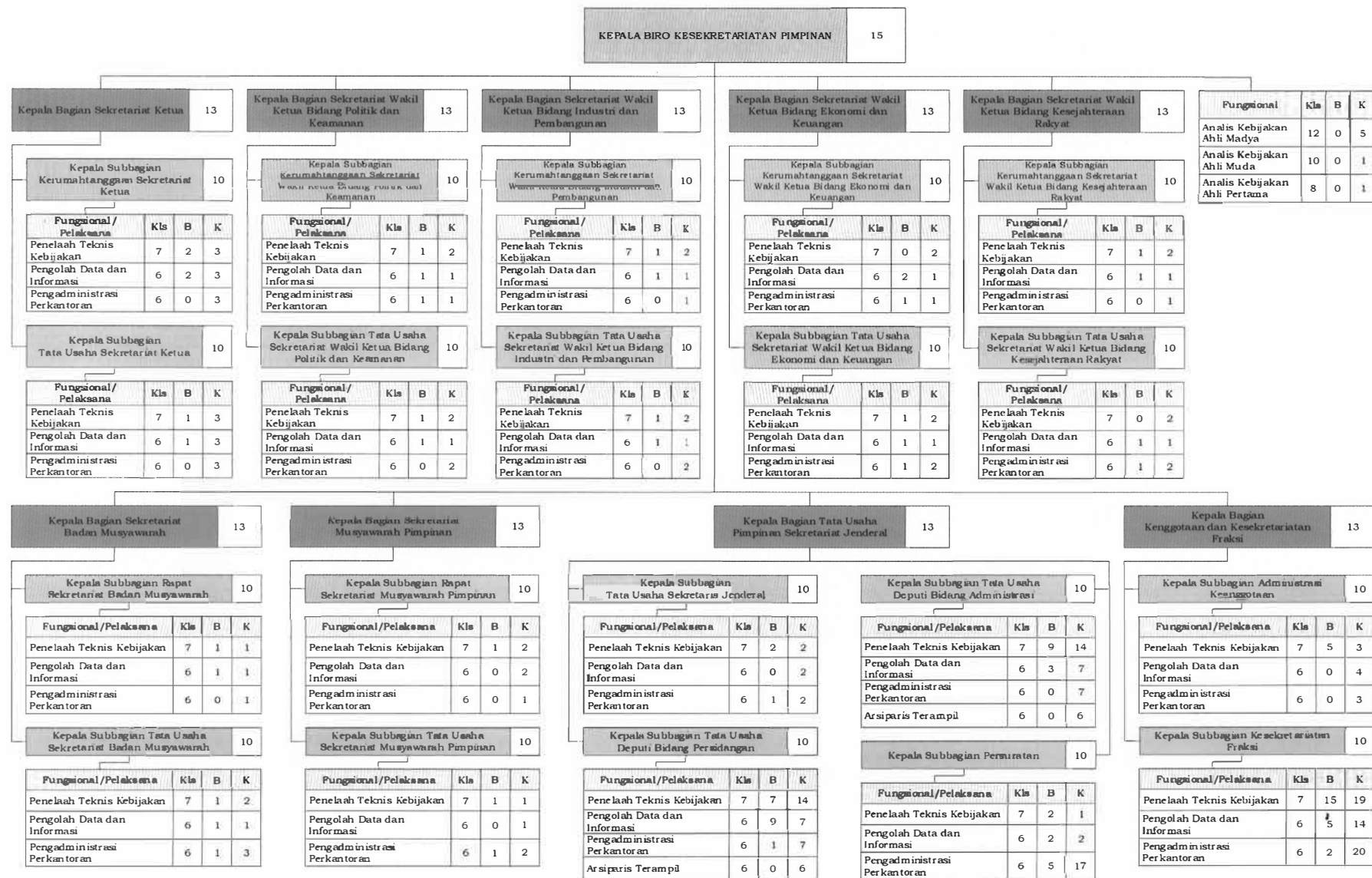
Jumlah Jabatan Fungsional dihitung berdasarkan jumlah jabatan fungsional berdasarkan jenjang jabatannya yang ada di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

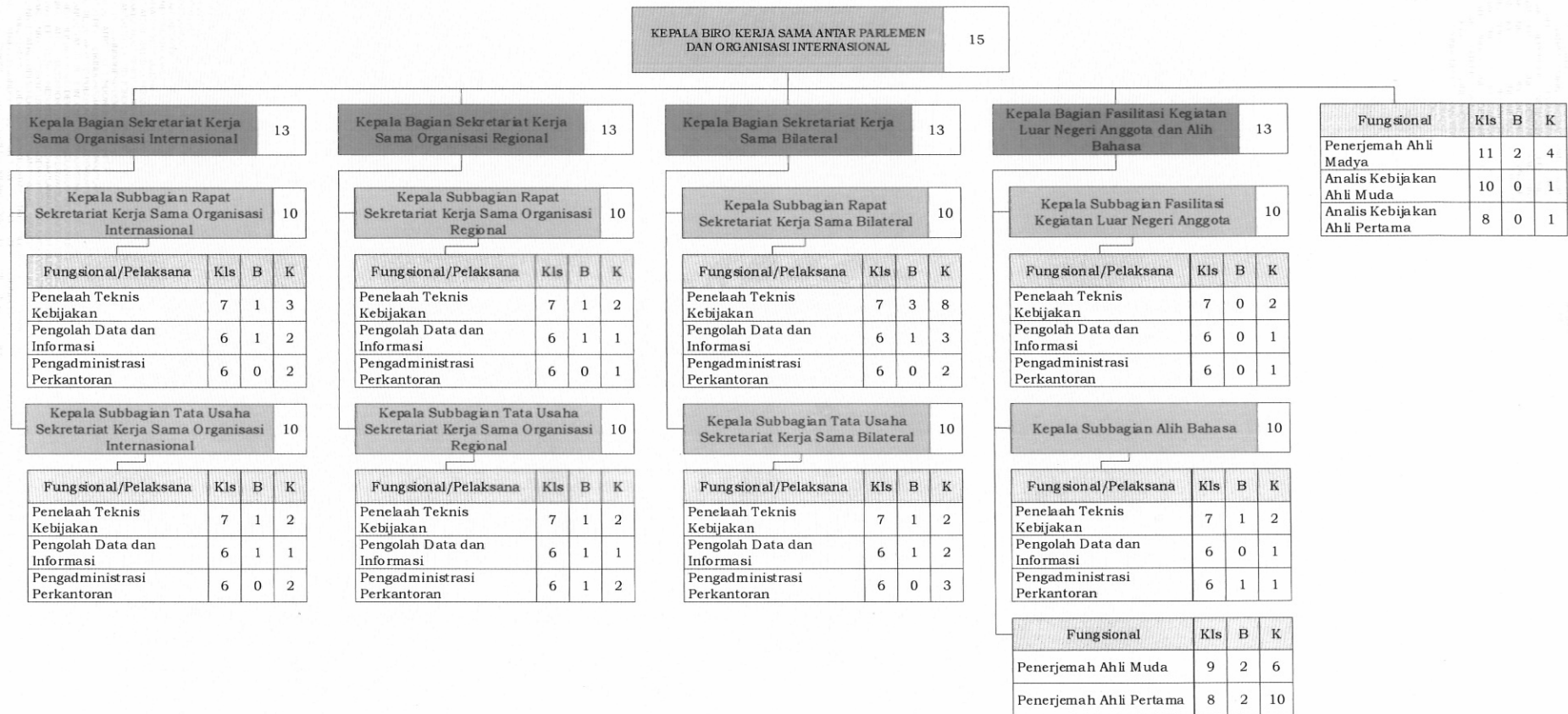
**PETA JABATAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

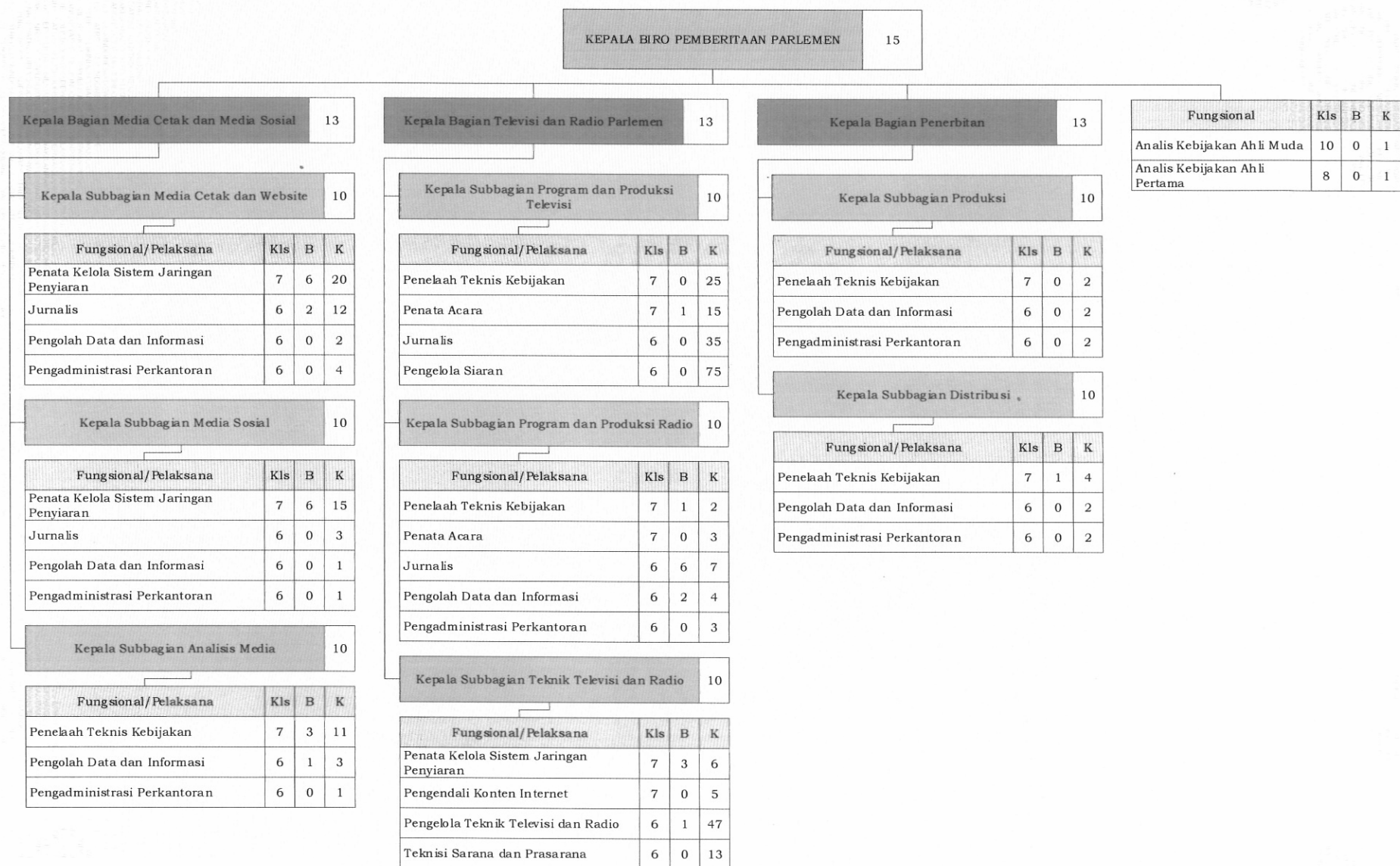


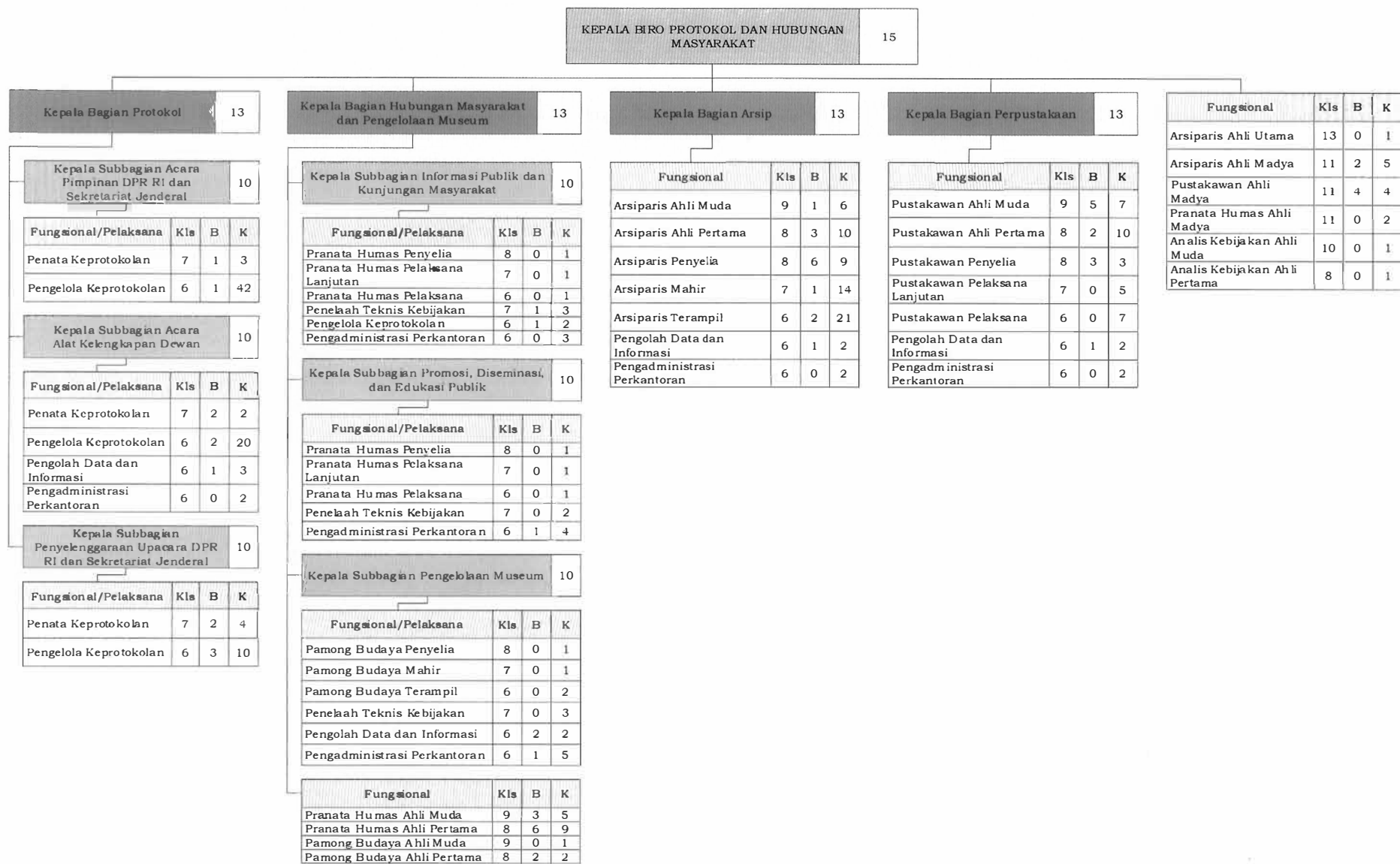
KEPALA BIRO PERSIDANGAN I					15
KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT KOMISI I					13
Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Komisi I					10
Fungsional/ Pelaksana	Kla	B	K		
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1		
Pengolah Data dan Informasi	6	2	2		
Pengadministrasi Perkantoran	6	0	1		
Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Komisi I					10
Fungsional/ Pelaksana	Kla	B	K		
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1		
Pengolah Data dan Informasi	6	1	1		
Pengadministrasi Perkantoran	6	0	2		
KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT KOMISI II					13
Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Komisi II					10
Fungsional/ Pelaksana	Kla	B	K		
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1		
Pengolah Data dan Informasi	6	1	2		
Pengadministrasi Perkantoran	6	0	1		
Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Komisi II					10
Fungsional/ Pelaksana	Kla	B	K		
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1		
Pengolah Data dan Informasi	6	1	1		
Pengadministrasi Perkantoran	6	1	2		
KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT KOMISI III					13
Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Komisi III					10
Fungsional/ Pelaksana	Kla	B	K		
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1		
Pengolah Data dan Informasi	6	2	2		
Pengadministrasi Perkantoran	6	0	1		
Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Komisi III					10
Fungsional/ Pelaksana	Kla	B	K		
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1		
Pengolah Data dan Informasi	6	1	1		
Pengadministrasi Perkantoran	6	1	2		
KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT KOMISI IV					13
Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Komisi IV					10
Fungsional/ Pelaksana	Kla	B	K		
Penelaah Teknis Kebijakan	7	0	1		
Pengolah Data dan Informasi	6	2	2		
Pengadministrasi Perkantoran	6	0	1		
Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Komisi IV					10
Fungsional/ Pelaksana	Kla	B	K		
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1		
Pengolah Data dan Informasi	6	1	1		
Pengadministrasi Perkantoran	6	1	2		
KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT KOMISI V					13
Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Komisi V					10
Fungsional/ Pelaksana	Kla	B	K		
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1		
Pengolah Data dan Informasi	6	2	2		
Pengadministrasi Perkantoran	6	0	1		
Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Komisi V					10
Fungsional/ Pelaksana	Kla	B	K		
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1		
Pengolah Data dan Informasi	6	2	1		
Pengadministrasi Perkantoran	6	1	2		
KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT KOMISI VI					13
Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Komisi VI					10
Fungsional/ Pelaksana	Kla	B	K		
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1		
Pengolah Data dan Informasi	6	1	2		
Pengadministrasi Perkantoran	6	1	1		
Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Komisi VI					10
Fungsional/ Pelaksana	Kla	B	K		
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1		
Pengolah Data dan Informasi	6	1	1		
Pengadministrasi Perkantoran	6	0	2		
KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT KOMISI VII					13
Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Komisi VII					10
Fungsional/ Pelaksana	Kla	B	K		
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1		
Pengolah Data dan Informasi	6	1	2		
Pengadministrasi Perkantoran	6	1	1		
Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Komisi VII					10
Fungsional/ Pelaksana	Kla	B	K		
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1		
Pengolah Data dan Informasi	6	2	1		
Pengadministrasi Perkantoran	6	0	2		
KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT KOMISI VIII					13
Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Komisi VIII					10
Fungsional/ Pelaksana	Kla	B	K		
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1		
Pengolah Data dan Informasi	6	0	2		
Pengadministrasi Perkantoran	6	1	1		
Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Komisi VIII					10
Fungsional/ Pelaksana	Kla	B	K		
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1		
Pengolah Data dan Informasi	6	1	1		
Pengadministrasi Perkantoran	6	1	2		
KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT KOMISI IX					13
Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Komisi IX					10
Fungsional/ Pelaksana	Kla	B	K		
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1		
Pengolah Data dan Informasi	6	1	2		
Pengadministrasi Perkantoran	6	0	1		
Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Komisi IX					10
Fungsional/ Pelaksana	Kla	B	K		
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1		
Pengolah Data dan Informasi	6	1	1		
Pengadministrasi Perkantoran	6	1	2		
KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT KOMISI X					13
Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Komisi X					10
Fungsional/ Pelaksana	Kla	B	K		
Penelaah Teknis Kebijakan	7	0	1		
Pengolah Data dan Informasi	6	1	2		
Pengadministrasi Perkantoran	6	1	1		
Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Komisi X					10
Fungsional/ Pelaksana	Kla	B	K		
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1		
Pengolah Data dan Informasi	6	1	1		
Pengadministrasi Perkantoran	6	0	2		
KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT KOMISI XI					13
Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Komisi XI					10
Fungsional/ Pelaksana	Kla	B	K		
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1		
Pengolah Data dan Informasi	6	2	2		
Pengadministrasi Perkantoran	6	1	1		
Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Komisi XI					10
Fungsional/ Pelaksana	Kla	B	K		
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1		
Pengolah Data dan Informasi	6	1	1		
Pengadministrasi Perkantoran	6	1	2		
KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN PARIPURNA					13
Kepala Subbagian Rapat Persidangan Paripurna					10
Fungsional/ Pelaksana	Kla	B	K		
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1		
Pengolah Data dan Informasi	6	1	2		
Pengadministrasi Perkantoran	6	0	1		
Kepala Subbagian Tata Usaha Persidangan Paripurna					10
Fungsional/ Pelaksana	Kla	B	K		
Penelaah Teknis Kebijakan	7	0	1		
Pengolah Data dan Informasi	6	1	1		
Pengadministrasi Perkantoran	6	0	2		
KEPALA BAGIAN RISALAH					13
Kepala Subbagian Pelayanan Risalah					10
Fungsional/ Pelaksana	Kla	B	K		
Asisten Perisalah Legislatif Penyelin	8	8	12		
Asisten Perisalah Legislatif Mualir	7	10	17		
Asisten Perisalah Legislatif Terampil	6	0	39		
Kepala Subbagian Tata Usaha Risalah					10
Fungsional/ Pelaksana	Kla	B	K		
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1		
Pengolah Data dan Informasi	6	1	1		
Pengadministrasi Perkantoran	6	1	2		
Fungsional/ Pelaksana					
Perisalah Legislatif Ahli Muda	9	12	23		
Perisalah Legislatif Ahli Pertama	8	6	39		





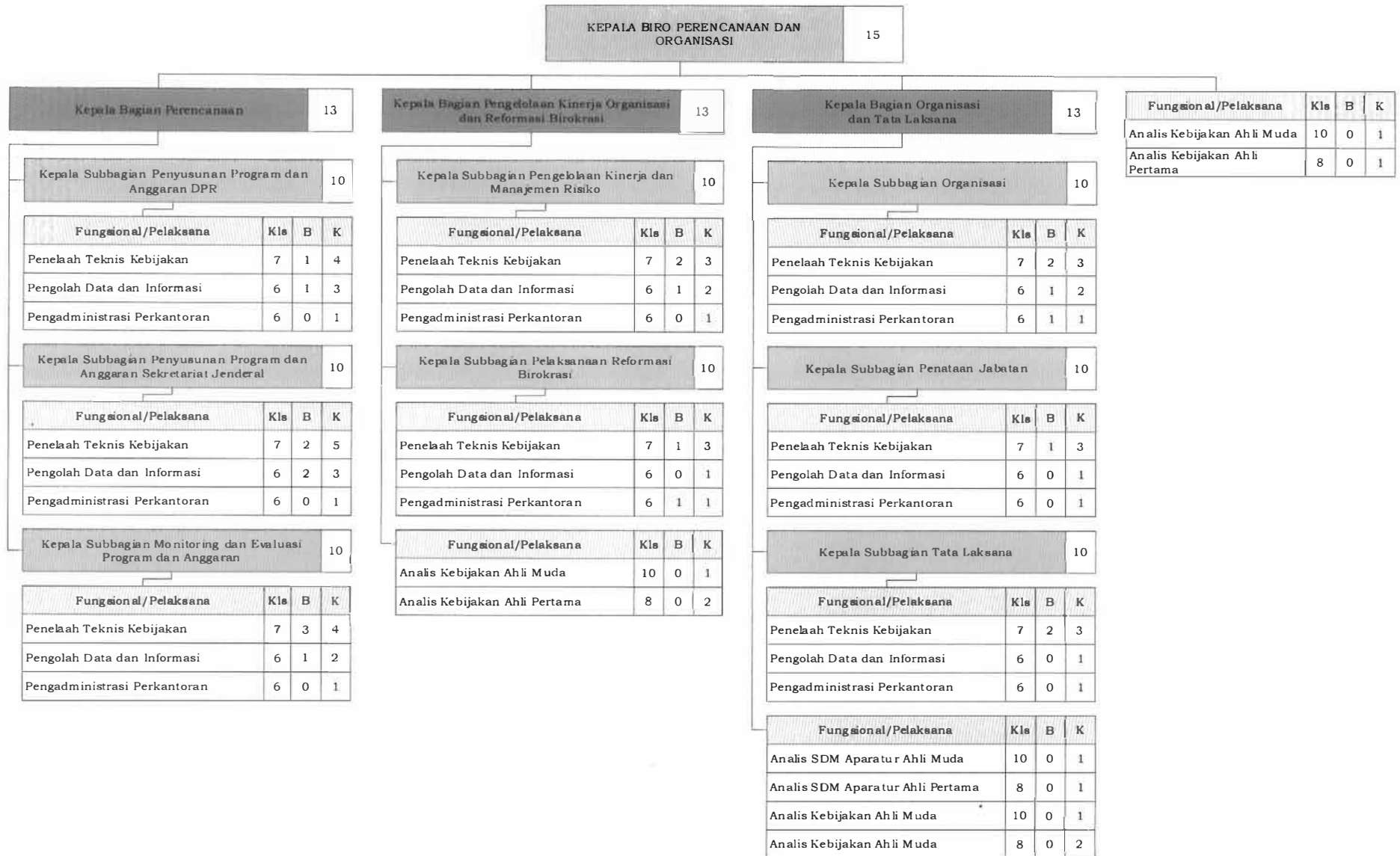


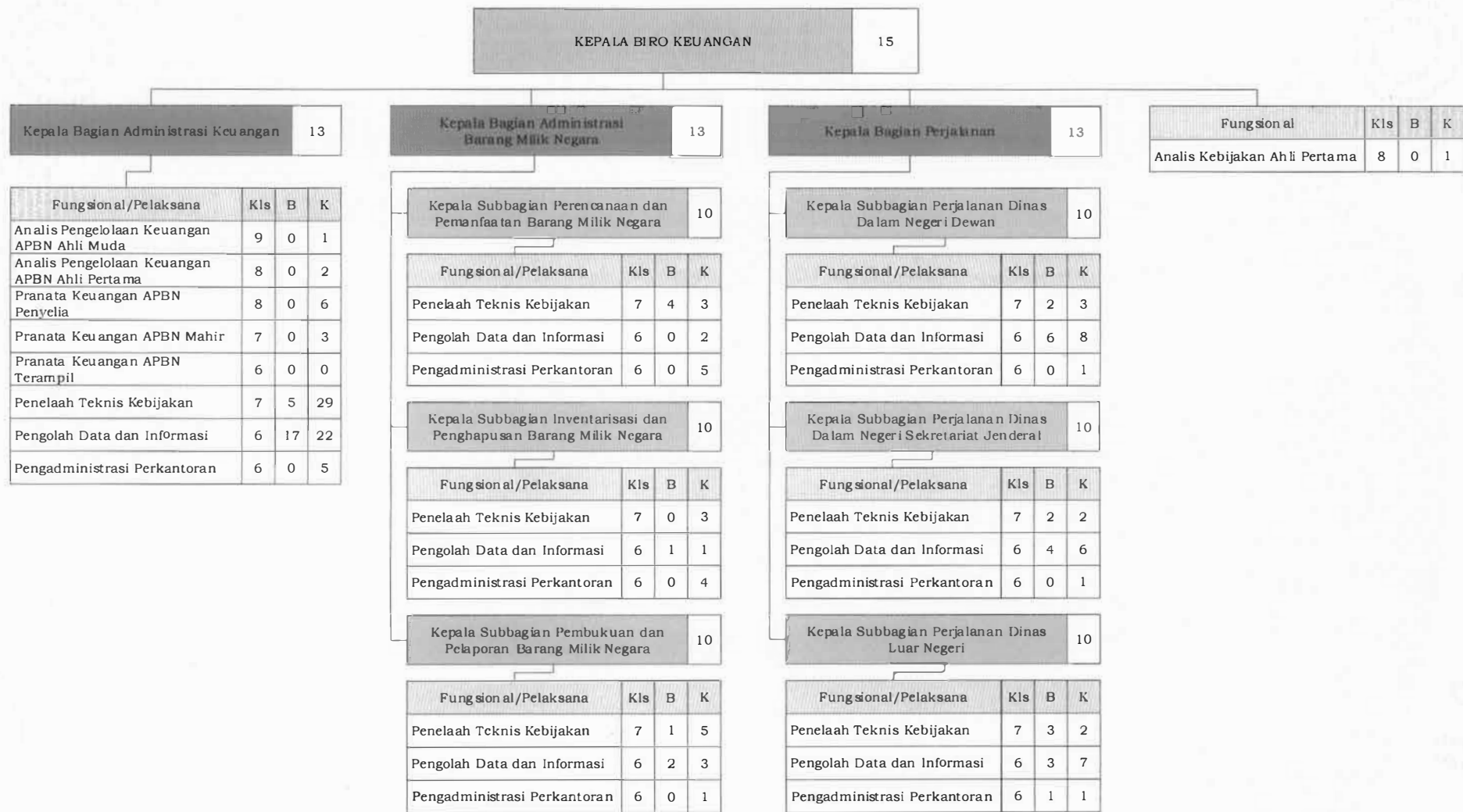


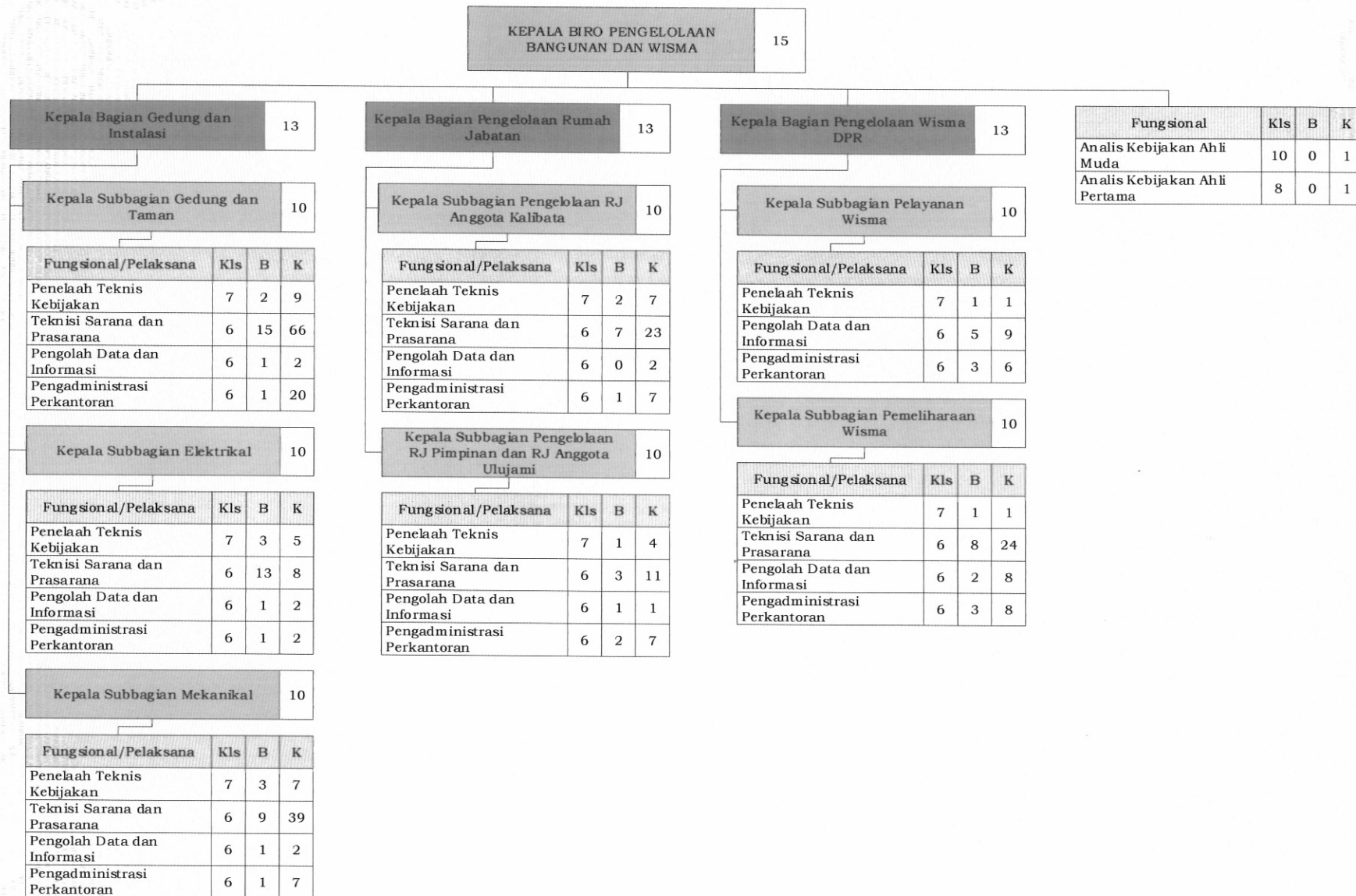


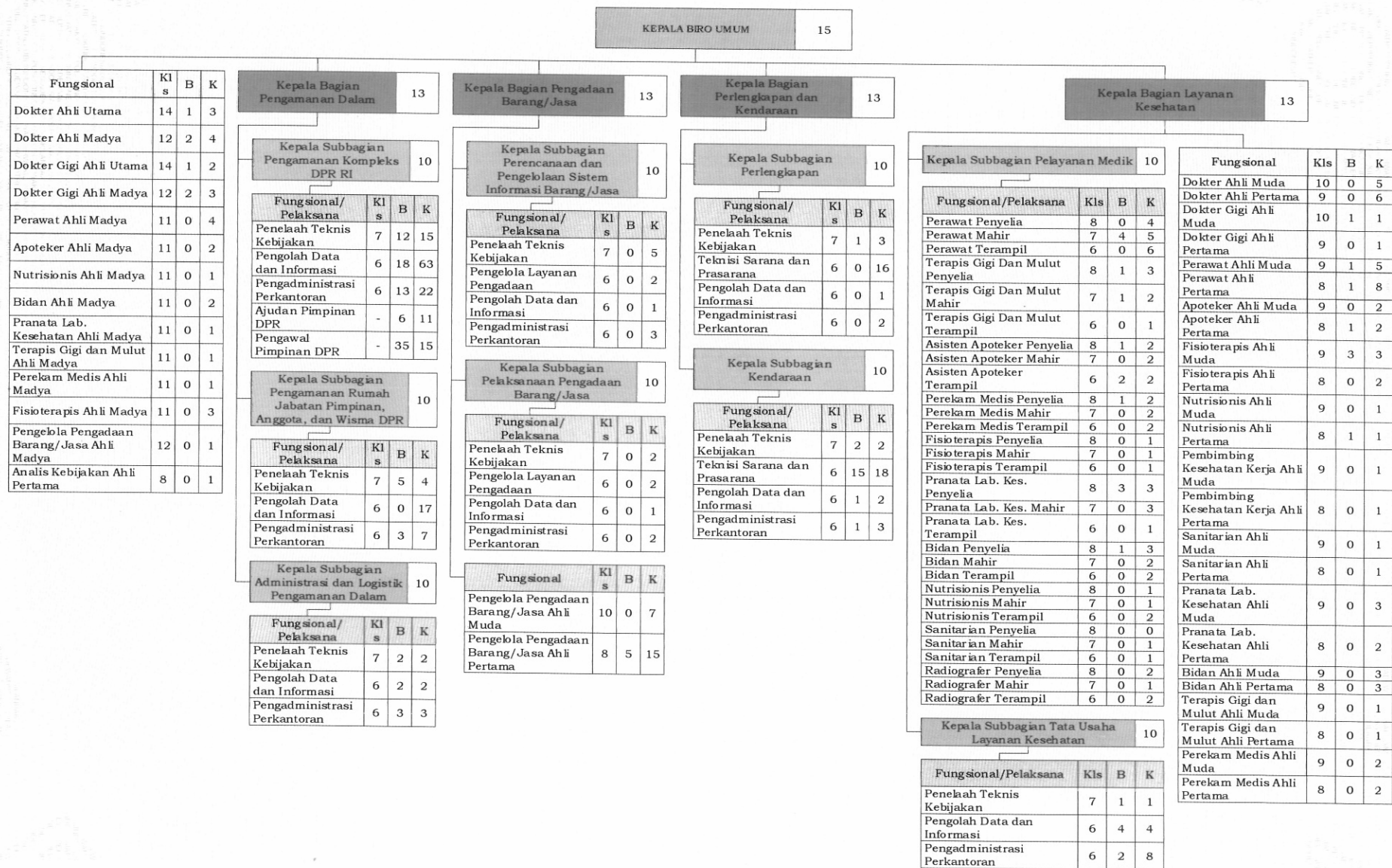


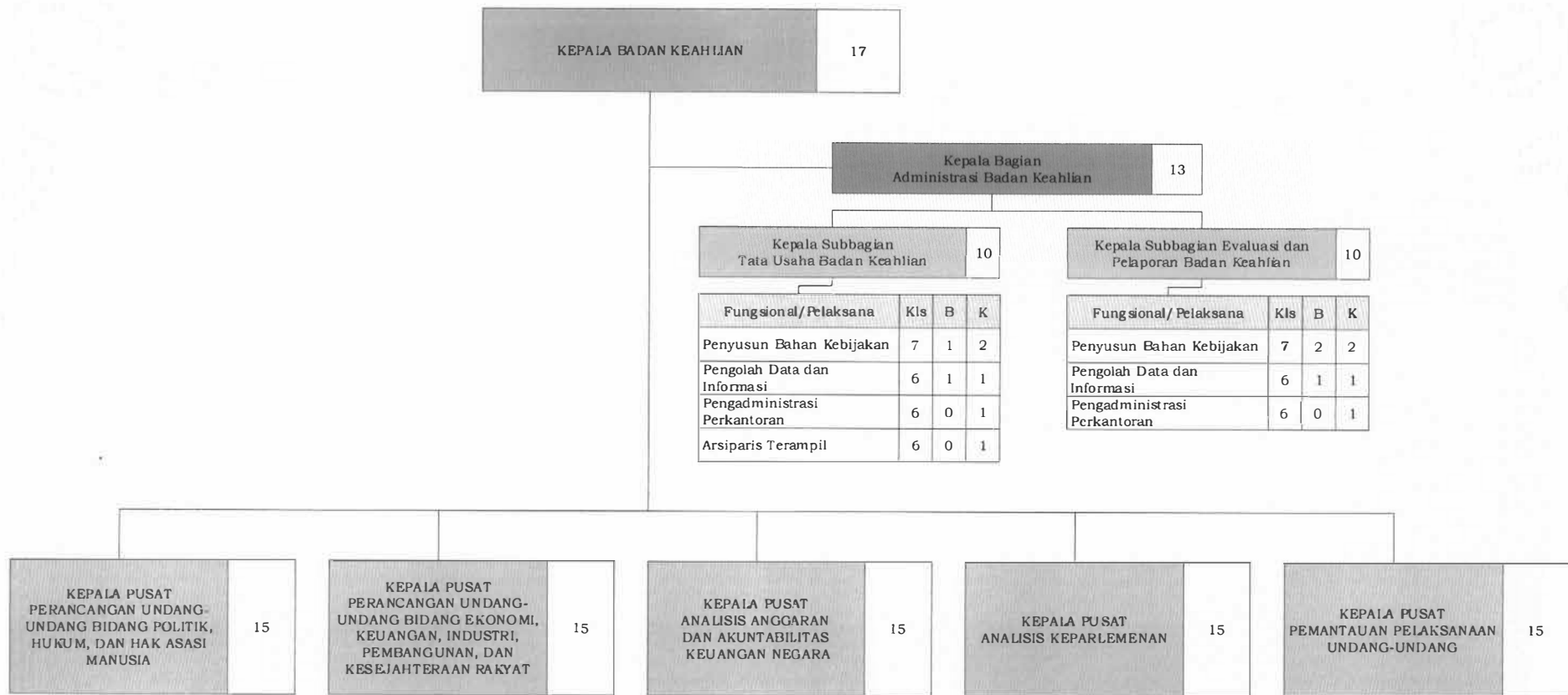












KEPALA PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN HAK ASASI MANUSIA	15
---	----

Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia	10
--	----

Fungsional/Pelaksana	Kls	B	K
Penelaah Teknis Kebijakan	7	0	5
Pengolah Data dan Informasi	6	2	3
Pengad ministrasi Perkantoran	6	0	3

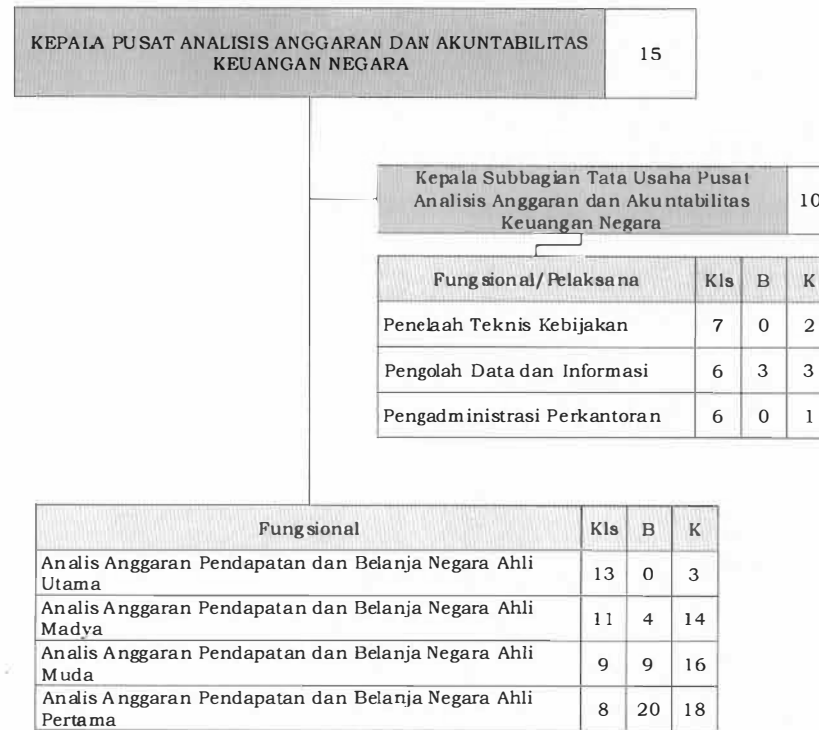
Fungsional	Kls	B	K
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Utama	14	0	2
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	12	6	11
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	10	10	12
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	8	5	15

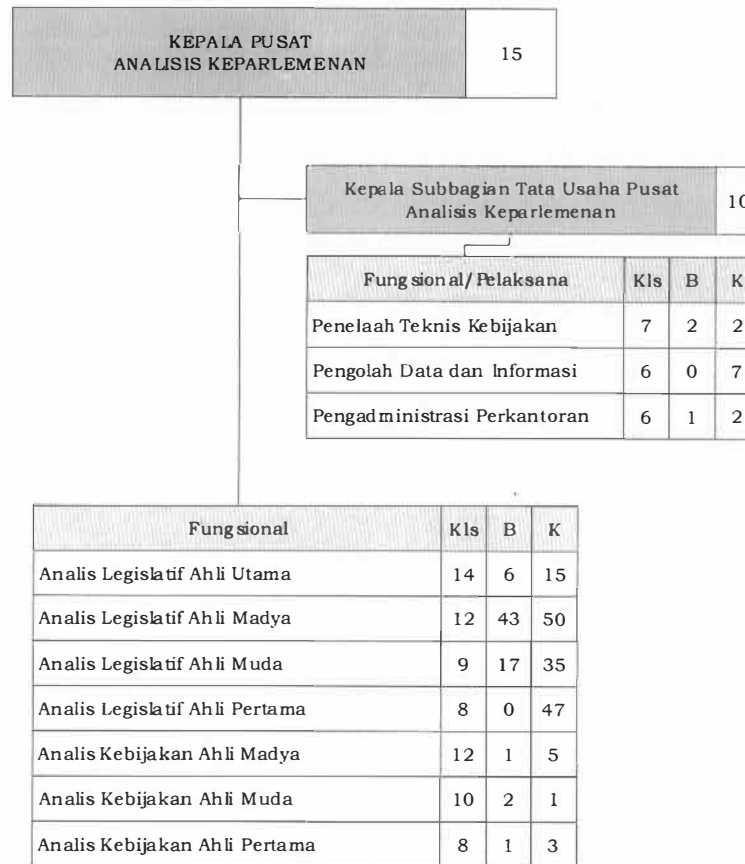
KEPALA PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	15
--	----

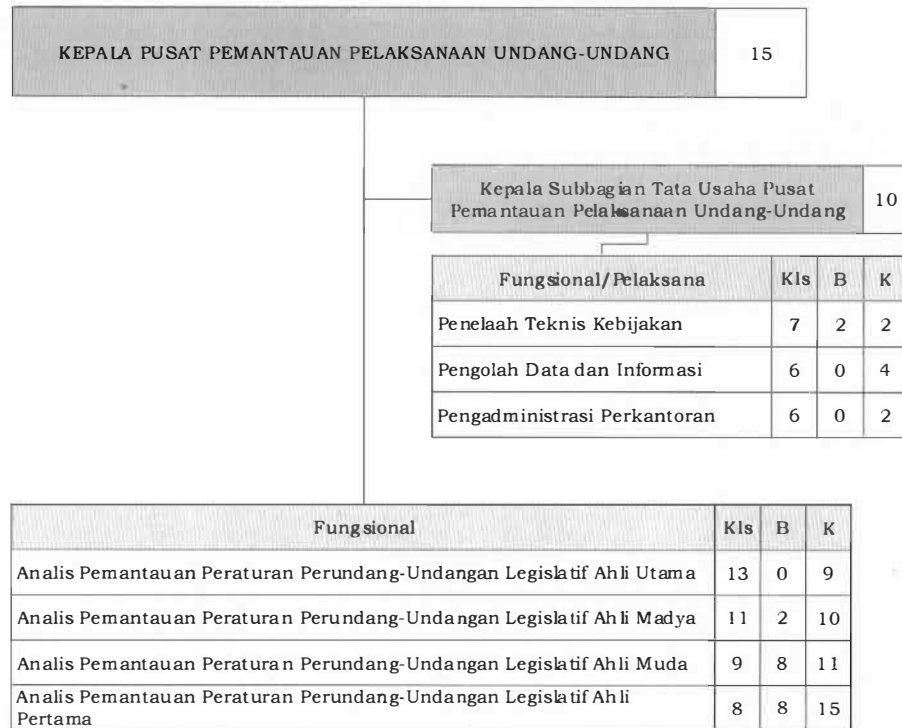
Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat	10
---	----

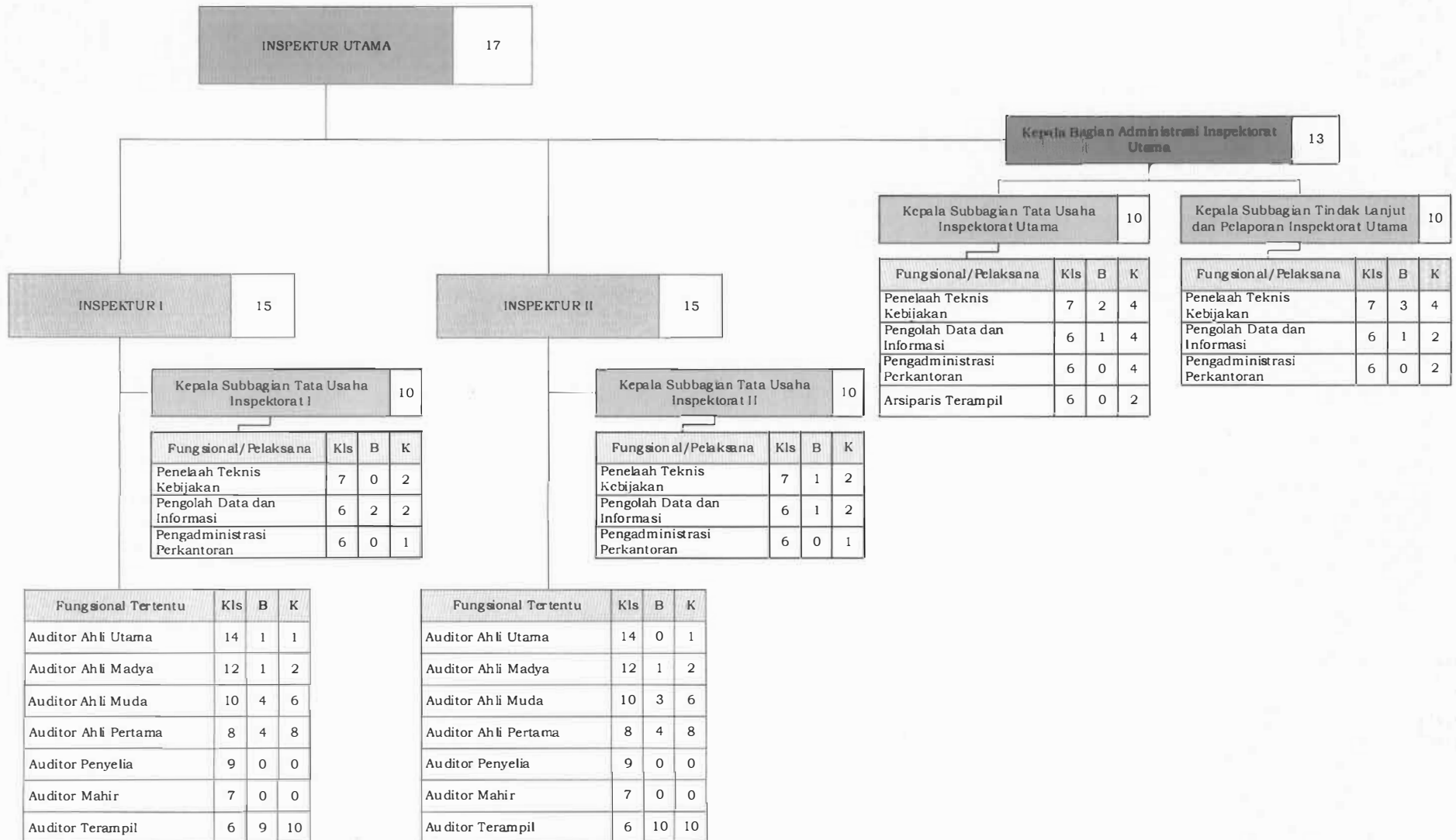
Fungsional/ Pelaksana	Kls	B	K
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	2
Pengolah Data dan Informasi	6	1	3
Pengadm inistrasi Perkantoran	6	0	2

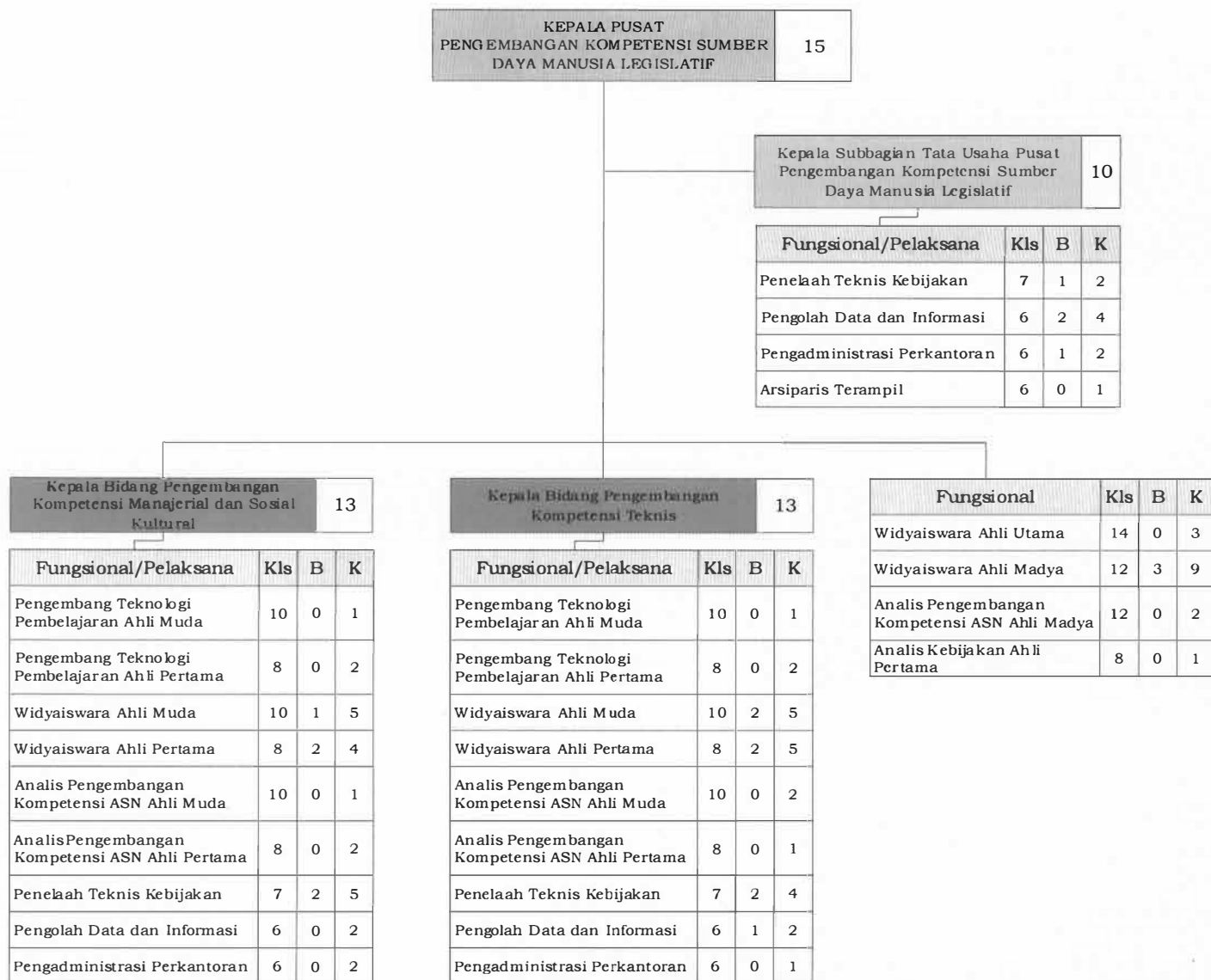
Fungsional	Kls	B	K
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Utama	14	0	2
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	12	14	14
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	10	11	14
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	8	5	15

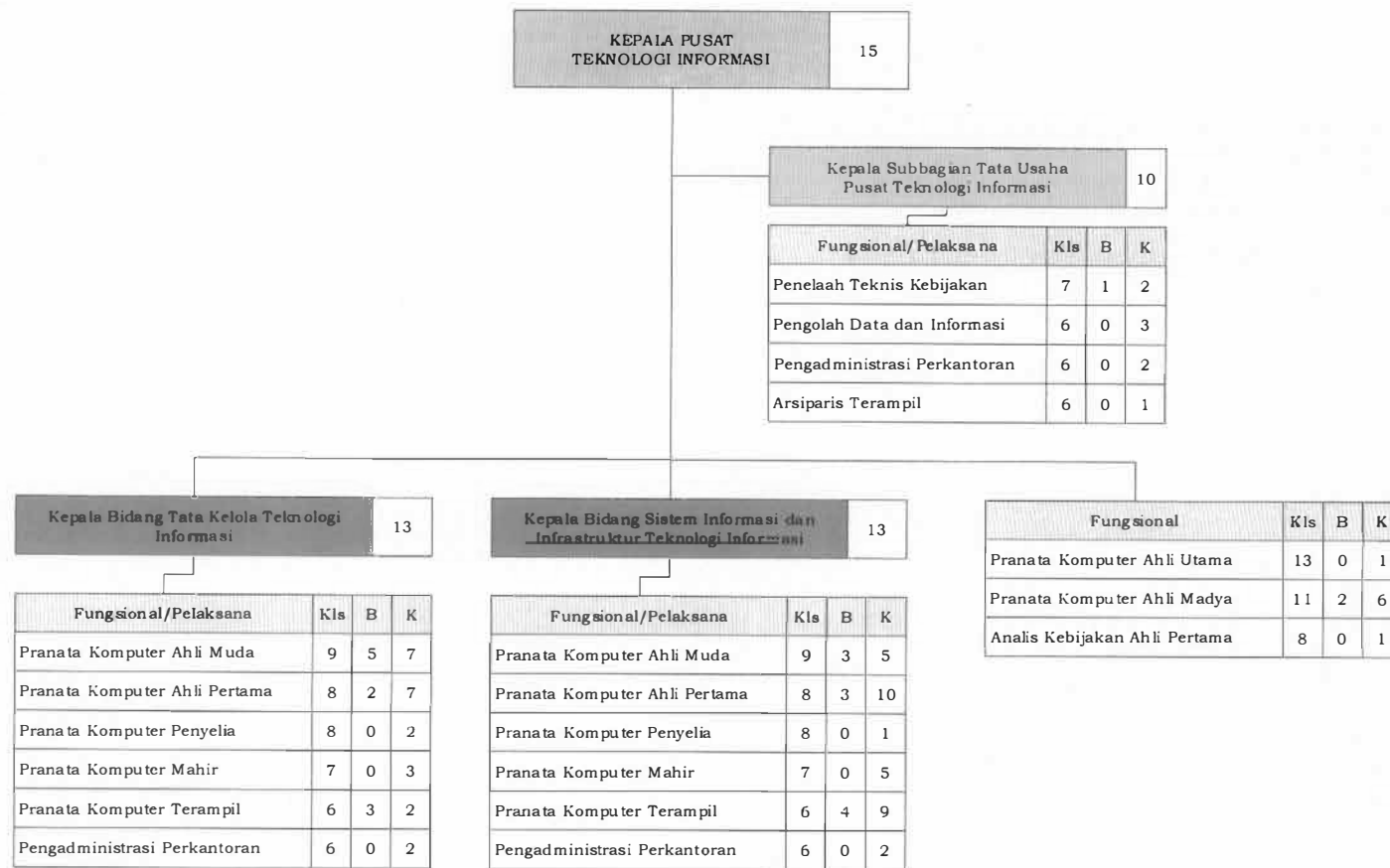












Keterangan Tabel

- Kelas (Kls) : Kelas jabatan sesuai dengan perhitungan nilai faktor jabatan
- Bezetting (B) : Jumlah pemangku jabatan atau sumber daya manusia yang ada saat ini
- Kebutuhan (K) : Jumlah kebutuhan pemangku jabatan dari hasil penghitungan beban kerja masing-masing jabatan dalam satu unit kerja

SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

INDRA NIKANDAR